

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warisan Kebijakan kolonial Hindia Belanda yang terus berlanjut hingga kebijakan nasional saat ini telah menjadi salah satu penyebab konflik tenurial di Indonesia. Melalui perspektif sejarah, perubahan kebijakan dari masa Hindia Belanda ke masa kemerdekaan dan reformasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konflik tenurial (Susilowati, 2015). Indonesia sebagai negara rentan konflik, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah, mengalami masalah agraria yang menjadi salah satu penyebab utama konflik. Menurut Wiradi (2009), konflik agraria muncul akibat empat ketidakcocokan, yaitu: ketimpangan dalam penguasaan sumber agraria, ketidaksesuaian peruntukan sumber-sumber agraria, perbedaan persepsi dan konsep mengenai agraria, serta ketidaksesuaian berbagai produk hukum yang muncul akibat pragmatisme dan kebijakan sektoral. Keempat faktor ini memicu kemarahan masyarakat dan menyebabkan konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria timbul dari interaksi antara individu atau kelompok yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya bumi dan kekayaan alam yang ada di permukaan maupun di dalam tanah (Sumarto, 2012; Mulyani, 2014; Zakie, 2016). Sejarah konflik agraria di Indonesia sangat panjang, dengan permasalahan di sektor kehutanan sudah ada sejak masa kolonial pada pertengahan abad ke-19 (Bahari, 2004). Seiring dengan pembangunan, kompleksitas dan variasi kasus konflik agraria semakin meningkat, mencakup berbagai sektor seperti perkebunan, infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, pesisir/kelautan, properti, migas, dan fasilitas militer (KPA, 2019). Pada masa krisis ekonomi dan reformasi, yang ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi, jumlah konflik kehutanan di Indonesia meningkat (Wulan et al., 2004). Pada tahun 2023, tercatat 20 kasus konflik lahan di kawasan hutan lindung, dengan total luas wilayah yang terlibat mencapai 20,57 hektar. Pada Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan di Kecamatan Sumarorong dengan luas kawasannya 2458 ,2 Ha merupakan areal terjadinya Konflik tenurial lahan.

Permasalahan yang muncul di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan terkait dengan klaim atas kawasan hutan antara masyarakat lokal dan pemerintah. Konflik tenurial di kawasan hutan mencerminkan adanya konflik dalam penguasaan lahan dan sumber daya, seperti kasus antara pengelola hutan dan masyarakat yang menggunakan kawasan tersebut untuk pemukiman, jalur transportasi, ladang, dan kebun (Dassir, 2008). Konflik sumber daya alam terjadi karena semakin langkanya sumber daya alam, sementara kepentingan terhadapnya tetap tinggi atau bahkan meningkat (Kartodihardjo, 2014). Perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai hak atas tanah dan sumber daya hutan antara pihak-pihak yang terlibat memicu konflik penguasaan tanah (Safitri dkk, 2011). Fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan tidak berjalan dengan optimal. Perubahan tutupan vegetasi di hutan lindung mulai terlihat ketika lahan pertanian masyarakat semakin menyusut. Pertumbuhan populasi yang terus menerus meningkatkan tekanan terhadap

kawasan hutan, sedangkan penegakan hukum terhadap perambahan hutan belum optimal (Kaimuddin, 2008). Ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga semakin meningkat (Yusran dan Abdulah, 2007). Di Desa Sasakan, terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah mengenai pemanfaatan kawasan hutan yang muncul dari klaim lahan yang dianggap sebagai tanah hak milik dan warisan nenek moyang. Klaim tersebut menyebabkan konflik vertikal antara masyarakat yang memanfaatkan hutan dan pemerintah yang melarang pemanfaatan tanpa izin dari Dinas Kehutanan. Konflik ini dapat berbentuk konflik vertikal maupun horizontal, dengan kedua jenis konflik tersebut timbul dari perbedaan persepsi dan konflik kepentingan di antara para aktor. Selain itu, konflik juga dapat timbul dari persaingan antar aktor untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, serta perbedaan akses di antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua sumber konflik ini bisa menyebabkan beragam masalah, baik bagi pihak yang terlibat maupun bagi objek konflik, dalam hal ini adalah sumber daya hutan (Sardi, 2010).

Luas Kawasan Hutan di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa adalah 2.204,04 hektar. Berdasarkan fungsinya, kawasan ini terdiri dari Hutan Lindung seluas 1.679,40 hektar dan Area Penggunaan Lain seluas 755,35 hektar (berdasarkan Peta Areal Kerja KPH Mamasa Tengah). Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan memanfaatkan area ini untuk pemukiman, fasilitas umum (Fasum) dan sosial (Fasos), serta lahan sawah dan kebun campuran. Klaim terhadap tanah adat yang diakui sebagai warisan leluhur menjadi alasan untuk memanfaatkan hutan, yang dapat mengancam keberadaan hutan itu sendiri. Tindakan ini dianggap sebagai penyerobotan hutan, yang memicu konflik dengan pengelola kawasan hutan. Menurut Senoaji (2009), banyak kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di luar fungsinya, seperti untuk lahan kebun, ladang, pemukiman, dan sawah. Perambahan hutan sering terjadi di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, dan hal ini berpotensi terus berlanjut karena penegakan hukum yang belum efektif. Peningkatan jumlah penduduk menciptakan berbagai kepentingan yang berbeda terkait dengan sumber daya hutan yang sama, yang dapat mengubah kondisi sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, hukum, dan politik, serta menciptakan kepentingan dan kebutuhan baru terhadap sumber daya hutan (Fuad dan Maskanah, 2000). Manajemen konflik sumber daya alam, yang sering disebut sebagai proses penyelesaian konflik, merupakan upaya untuk mengatasi ketegangan antara pihak-pihak yang berselisih terkait kepentingan mereka dalam mengakses sumber daya alam. Terdapat berbagai teknik atau alternatif penyelesaian konflik yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan oleh kelompok yang bersengketa, dengan tujuan untuk menghindari penyelesaian melalui jalur hukum (Prayitno, 2020). Salah satu pendekatan menarik dalam penyelesaian konflik sumber daya adalah melalui partisipasi masyarakat lokal yang bersifat persuasif dan berkomitmen terhadap kesepakatan bersama (Mitchell et al., 2000). Pendekatan ini dapat dianggap sebagai proses manajemen konflik.

Manajemen atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai solusi konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan aksesibilitas, interaksi antara pemangku kepentingan, dan pendapatan (Hidayah, 2012). Ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya hutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional (Arifandi dan Sihaloho, 2015). Menurut Haider (2009), pengembangan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik merupakan salah satu bentuk resolusi konflik berbasis komunitas.

Bentuk pemberdayaan melalui mekanisme perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar hutan merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah konflik tenurial di kawasan hutan (Sumanto, 2009). Pada Peraturan Kementrian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No. 84 Tahun 2015 mengenai Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, disebutkan bahwa perhutanan sosial adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik tenurial. Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan dengan memberikan akses legal kepada masyarakat lokal. Akses ini mencakup pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, serta pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya hutan. Konsep pengembangan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, sambil tetap memperhatikan fungsi lahan yang menjadi objek konflik dan berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Susan, 2018). Pembangunan masyarakat juga harus dilakukan secara kolaboratif (Kurniawan, 2012) dan melalui komitmen bersama untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat (Susan, 2018). Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat perlu dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis (Sumanto, 2009).

Untuk kawasan yang tidak dapat dipertahankan sebagai hutan, dapat diajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Mekanisme yang digunakan melibatkan pengusulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi oleh gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan ini harus diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Pihak pengelola juga akan mengakomodasi perubahan peruntukan kawasan hutan bagi masyarakat yang memiliki bukti sah kepemilikan lahan yang diterbitkan sebelum tahun 1985 (Senoaji et al., 2020).

Saat ini, konflik penguasaan lahan antara masyarakat dan pemerintah di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan masih belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dan memastikan pengelolaan Hutan Lindung Desa Sasakan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik klaim lahan terjadi di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penduduk sekitar hutan lindung, termasuk sejarah lahan, tenur, kelembagaan, dan mata pencaharian?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan yang telah dihuni oleh masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

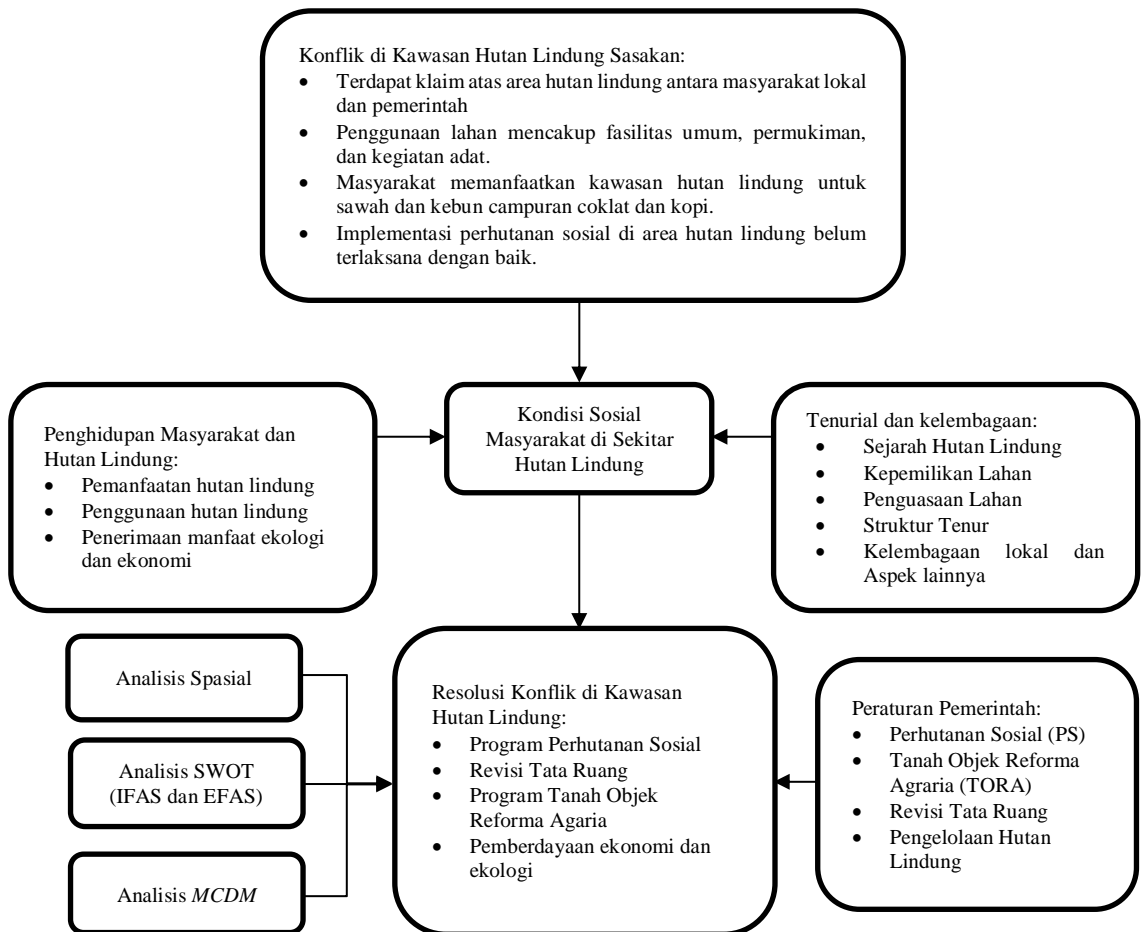
1. Mengidentifikasi konflik yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan.
2. Menganalisis kondisi sosial ekonomi penduduk sekitar hutan lindung, meliputi sejarah lahan, tenurial, kelembagaan, dan mata pencaharian.
3. Merumuskan solusi untuk konflik yang ada di Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai:

1. Pertimbangan atau masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung untuk mengatasi konflik yang ada.
2. Dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait kasus dan konflik di sektor kehutanan.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.Kerangka Pemikiran

Di kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan, terdapat konflik yang melibatkan hak atas tanah dan penggunaan sumber daya hutan antara masyarakat lokal dan pihak-pihak lain. Konflik ini sering kali mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu mengkaji beberapa aspek penting yang berhubungan dengan kondisi penduduk dan pengelolaan hutan.

Pertama, analisis kondisi penduduk di sekitar Hutan Lindung sangat penting. Hal ini mencakup pengamatan terhadap tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari hutan. Dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi sosial ekonomi penduduk, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana hutan berkontribusi pada kehidupan mereka.

Selain itu, analisis spasial juga diperlukan untuk menilai penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya hutan. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami

bagaimana konflik yang terjadi berkaitan dengan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan, serta bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi situasi ini.

Untuk menyelesaikan konflik yang ada, penting untuk mengeksplorasi solusi yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui program Perhutanan Sosial (PS) yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara legal. Selain itu, revisi tata ruang yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian hutan juga sangat diperlukan.

Akhirnya, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta dengan skoring dalam MCDM dapat digunakan untuk menilai posisi saat ini dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercapai resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan di kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan.

3	Alat Tulis Menulis (ATM)	Mencatat proses penelitian
4	Receiver Global Positioning system (GPS)	Mengambil titik lokasi penelitian

Tabel 2. Bahan Penelitian

No	Bahan	Fungsi
1	Peta Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan	Lokasi pengambilan data
2	Pertanyaan wawancara	Mendapatkan informasi dari responden

2.3 Metode Pengambilan data Penelitian

2.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penduduk lokal yang telah lama tinggal di Kawasan Hutan serta penduduk yang memiliki pondok, sawah, dan kebun campuran di area tersebut. Jumlah penduduk lokal yang terlibat sekitar 24 orang, yang meliputi penduduk lokal yang telah lama tinggal di kawasan hutan serta penduduk yang memiliki pondok, sawah, dan kebun campuran di area tersebut. Selain penduduk setempat, pengambilan sampel juga mencakup Pemerintah Desa Sasakan, Kesatuan Pengelola Hutan KPH mamasa tengah Kabupaten Mamasa, Penyuluh Kehutanan, dan Tokoh Masyarakat.

Tabel 3. Jumlah Responden Penelitian

No	Responden	Kriteria Sampel	Metode	Jumlah
1	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa yang memahami sejarah penggunaan lahan dan penetapan kawasan hutan.	Purposive Sampling	3 (Kepala Desa, Aparat Desa)
2	Tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat yang memahami sejarah penggunaan lahan dan penetapan kawasan hutan.	Purposive Sampling	3 Kepala Dusun
3	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan hutan Masyarakat yang memiliki pondok, sawah, dan kebun campuran di kawasan hutan 	Purposive Sampling	16 (Penduduk)

4	Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)	Pegawai kehutanan yang memahami penentuan kawasan hutan dan penggunaan lahan	Purposive Sampling	2 Orang (Kepala KPH Mamasa Tengah, Penyuluh Kehutanan)
---	--------------------------------	--	--------------------	--

2.3 Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b) Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari pemerintah kota, instansi terkait lainnya,

serta studi pustaka. Data sekunder ini meliputi:

- 1) Umum lokasi penelitian, termasuk letak dan kondisi fisik lingkungan.
- 2) Keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Kondisi biofisik
- 4) Informasi mengenai keadaan penduduk.

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, secara umum adalah data kualitatif. Oleh karena itu, rancangan penelitian ini akan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, meskipun tetap memungkinkan untuk memperoleh data dan menerapkan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis, seperti dokumen peraturan, laporan pelaksanaan, dan arsip lain yang relevan dengan penelitian. Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah konsep dan pembahasan. Selain itu, studi dokumentasi juga menjelaskan posisi masalah dalam konteks yang tepat. Dokumen-dokumen yang ada akan dianalisis menggunakan analisis isi, yang dilakukan untuk melengkapi informasi peneliti serta

mendukung teknik pengumpulan data melalui wawancara dan juga observasi.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, orang yang melakukan wawancara disebut sebagai pewawancara atau interviewer, sedangkan pihak yang diwawancarai disebut sebagai interviewee (Usman, 2004: 57-58). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, yang dipilih secara purposif. Informan adalah objek penelitian yang dianggap kompeten dan representatif sesuai dengan tujuan penelitian (informan kunci). Pada saat melakukan wawancara, peneliti memanfaatkan instrumen berupa pedoman wawancara yang disusun berdasar pada parameter yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Meskipun demikian, pedoman ini tetap memberikan ruang untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui metode lain. Wawancara akan dilakukan secara mendalam, dengan pertanyaan yang diajukan secara fleksibel, terbuka, dan tepat sasaran. Pedoman wawancara mencakup beberapa pertanyaan utama yang menjadi acuan bagi peneliti. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikembangkan selama wawancara, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dari informan hingga merasa cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

c) Pengamatan Langsung (observasi) di Lapangan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, penting untuk melakukan observasi langsung di lapangan sebagai pelengkap dari pandangan informan yang diperoleh melalui wawancara. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat situasi secara langsung, sehingga dapat menangkap nuansa dan konteks yang mungkin tidak diungkapkan oleh informan.

d) Study Literatur

Studi literatur adalah proses pengumpulan data sekunder dan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pendukung yang relevan.

e) Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017) kuisisioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun kuisisioner pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Jenis dan teknik Pengumpulan data

Konsep /variable penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber data	Teknik Pengumpulan
Variabel pokok	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah kawasan, Tenur, kelembagaan dan penghidupan penduduk sekitar Hutan Lindung Jenis Konflik yang terjadi Resolusi konflik Peraturan pemerintah yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pemerintah Tokoh Masyarakat Masyarakat 	Observasi dan Wawancara
Karakteristik individu	<ul style="list-style-type: none"> Umur Pendidikan terakhir Jumlah tanggungan Luas lahan dalam kawasan Pekerjaan Bentuk pemanfaatan Status kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Masyarakat Kawasan Hutan Lindung Desa Sasakan 	Observasi dan Wawancara
Kondisi umum	<ul style="list-style-type: none"> Keadaan umum lokasi Keadaan sosial ekonomi penduduk 	BPS, UPTD Terkait	Wawancara dan studi pustaka
Penghidupan penduduk dan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Hutan Lindung Pengunaan Hutan Lindung Manfaat ekonomi/ekologi 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pemerintah Masyarakat 	Wawancara dan Studi Pustaka
Resolusi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> Program Perhutanan Sosial Revisi tata ruang Pemberdayaan ekonomi/ekologi 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pemerintah Tokoh masyarakat Anggota 	Wawancara dan Studi Pustaka

Tabel 5. Data Penelitian

No.	Tujuan	Data	Metode	Analisis
1	Mengidentifikasi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> Identitas aktor (individu, kelompok, lembaga), peran, kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara mendalam, FGD, studi dokumen Pemetaan partisipatif, GIS, survei lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Deskriptif Kualitatif Analisis aktor/stakeholder mapping

		<ul style="list-style-type: none"> • Data sejarah penguasaan lahan, aturan hukum, klaim masyarakat, kebijakan pemerintah • Data spasial: peta batas administrasi, peta kawasan hutan, peta klaim masyarakat • Data kejadian konflik, frekuensi, tingkat kekerasan, dampak sosial-ekonomi 		<ul style="list-style-type: none"> • Analisis spasial (GIS overlay, analisis tumpang tindih) • Analisis kronologi, analisis tren (time series)
2	Menganalisis Kondisi Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Data ekonomi rumah tangga, akses terhadap sumber daya, • Mata Pencaharian 	Survei rumah tangga, wawancara, kuesioner, data sekunder (BPS, desa)	Analisis deskriptif kuantitatif, analisis kesejahteraan, analisis livelihood
3	Merumuskan Resolusi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Data persepsi masyarakat, kesediaan untuk berunding, regulasi penyelesaian sengketa 	Wawancara, FGD, kuesioner	Analisis SWOT, analisis IFAS dan EFAS, analisis spasial, analisis <i>Multi-Criteria Decision Making</i>

2.4 Metode Analisis Data Penelitian

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menerapkan beberapa metode analisis data sebagai berikut:

2.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan mengorganisasikan data sampel sehingga lebih mudah dipahami. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020).

2.4.2 Analisis SWOT

Strategi penyelesaian konflik tenurial di Kawasan Hutan Desa Sasakan dijelaskan menggunakan matriks SWOT. Analisis SWOT berfungsi untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor guna merumuskan strategi. Metode ini membedakan antara kekuatan dan kelemahan internal di satu sisi, serta peluang dan ancaman eksternal di sisi lain. Penyusunan strategi SWOT didasarkan pada faktor-faktor eksternal dan internal yang ada.

Melalui analisis SWOT, dihasilkan empat strategi, yakni:

- SO (KekuatanPeluang)
- ST (Kekuatan–Ancaman)
- WO (Kelemahan–Peluang)
- WT (Kelemahan–Ancaman)

Menurut Rangkuti (2017), matriks ini secara jelas menunjukkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal. Faktor strategi internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) ditentukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Menyusun hingga sepuluh peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam kolom pertama.
- b) Memberikan bobot pada masing-masing faktor di kolom kedua, mulai dari 1,0 (sangat penting) hingga 0,0 (tidak penting), berdasarkan relevansinya terhadap optimalisasi strategi penyelesaian konflik.
- c) Menghitung rating untuk setiap faktor di kolom ketiga, menggunakan skala dari 4 (sangat kuat) hingga 1 (di bawah rata-rata), berdasarkan dampak faktor tersebut terhadap strategi penyelesaian konflik. Variabel positif diberi nilai antara +1 hingga +4 (sangat baik), sedangkan variabel negatif diberi nilai sebaliknya.
- d) Mengalikan bobot di kolom dua dengan rating di kolom tiga untuk mendapatkan faktor pembobotan di kolom empat. Hasilnya adalah skor pembobotan untuk masing-masing faktor, yang bervariasi dari 4,0 (sangat baik) hingga 1,0 (di bawah rata-rata).
- e) Berikan komentar atau catatan mengenai pemilihan faktor tertentu dan proses

perhitungan skor pembobotan.

- f) Menjumlahkan skor pembobotan di kolom empat untuk mendapatkan skor total, yang menunjukkan unit reaksi terhadap faktor strategi, baik eksternal maupun internal.

Pemilihan faktor-faktor strategi eksternal dan internal dilakukan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat penelitian dan data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder. Selanjutnya faktor-faktor strategi ini disusun dalam bentuk matriks, seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 6. Matriks Identifikasi Pemberian Bobot Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Lahan

NO	FAKTOR	BOBOT	RANTING
Internal			
I	Kekuatan	0-1	1-4
	Kelemahan	0-1	1-4
Eksternal			
II	Peluang	0-1	1-4
	Ancaman	0-1	1-4

Dalam matriks SWOT ini, akan diperlihatkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat diselaraskan dengan kekuatan dan kelemahan, yang menghasilkan empat alternatif strategi yang mungkin, seperti yang tercantum dalam Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 7. Matriks analisis SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)		
Threats (Ancaman)		

Hasil akhir analisis SWOT ini akan melahirkan rekomendasi resolusi konflik yang kemudian akan dilakukan skoring mengenai tingkatan prioritas dari keseluruhan rekomendasi dengan menggunakan metode *Multi-Criteria Decision Making (MCDM)* yaitu suatu pendekatan analisis keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. MCDM dikembangkan untuk membantu pengambil keputusan

ketika masalah yang dihadapi melibatkan banyak dimensi penilaian yang tidak dapat diwakili hanya oleh satu indikator tunggal (Keeney & Raiffa, 1993; Triantaphyllou, 2000).

Dalam penelitian ini, MCDM membantu mengubah hasil analisis kualitatif (SWOT, IFAS, EFAS) menjadi urutan prioritas yang terukur secara kuantitatif. Hal ini memungkinkan peneliti tidak hanya menyampaikan rekomendasi, tetapi juga memberikan justifikasi numerik atas urutan prioritas, sehingga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan secara lebih terarah.

2.4.3 Analisis Spasial

Penelitian ini menggunakan analisis spasial/data peta melalui metode tumpang susun (overlay) untuk mengamati perubahan penggunaan lahan serta kesesuaian perubahan tersebut dengan Arah fungsi ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.